

ANALISIS FRAMING ISU PENUNDAAN PEMILU 2024 DI CNN INDONESIA.COM DAN KOMPAS.COM

[FRAMING ANALYSIS OF 2024 GENERAL ELECTION POSTPONEMENT ISSUE IN CNNINDONESIA.COM AND KOMPAS.COM]

Silvanus Alvin*

Program Studi Perkuliahan Jarak Jauh Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara

ABSTRACT

Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Pandjaitan raised the issue of postponing the 2024 elections based on Big Data's claims of 110 million citizens' votes. Many parties asked for Luhut's explanation, one of which came from the students. On 12 April 2022, Luhut argued with a group of university students regarding the issue of the postponement of the 2024 election and the claims of Big Data. The event received significant attention from the public. Google Trends also shows a graph with a value of 100, which means high interest among netizens in the vital phenomenon. The incident also received significant attention from the press media in Indonesia. The Reuters Institute places the two press media with the highest levels of public trust, CNNIndonesia.com and Kompas.com. This research was conducted to know the framing of news from the two most trusted press media in Indonesia. News framing was analyzed using Robert N. Entman's model. The research object is a collection of news on 12 April 2022 related to the debate between Luhut and students. The total news researched was 11 news stories, with details of five news from CNNIndonesia.com and six news from Kompas.com. The results of this study indicate that there are two different framings. CNNIndonesia.com focuses more on two things, namely, Luhut as a central figure who must be responsible for the issue of delaying the 2024 Election and is obliged to show the validity of Big Data claims. Meanwhile, Kompas.com frames the issue of postponing the 2024 election as the government's responsibility, not Luhut personally.

Keywords: *Luhut, Postponement of 2024 Elections, Big Data, Framing Analysis*

ABSTRAK

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencetuskan isu penundaan Pemilu 2024 yang dilandasi atas klaim Big Data sejumlah 110 juta suara warganet. Banyak pihak meminta penjelasan Luhut, salah satunya datang dari kalangan mahasiswa. Pada 12 April 2022, Luhut berdebat dengan sekumpulan mahasiswa terkait isu Penundaan Pemilu 2024 dan klaim Big Data. Peristiwa tersebut mendapatkan perhatian besar dari publik. Google Trends juga memperlihatkan grafik dengan nilai 100, yang berarti ada ketertarikan tinggi warganet atas kejadian itu. Peristiwa tersebut juga mendapat perhatian besar dari media pers di Indonesia. Dari sekian banyak, Reuters Institute menempatkan dua media pers dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi adalah CNNIndonesia.com dan Kompas.com. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama mengetahui pembingkai berita dari dua media pers yang paling dipercaya di Indonesia. Pembingkai berita dianalisis menggunakan model Robert N. Entman. Objek penelitian adalah kumpulan berita pada 12 April 2022 terkait debat antara Luhut dan mahasiswa. Total berita yang diteliti adalah 11 berita, dengan rincian lima berita dari CNNIndonesia.com dan enam berita dari Kompas.com. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua pembingkai yang berbeda. CNNIndonesia.com lebih menitikberatkan pada dua hal yakni,

* Korespondensi Penulis:

E-mail: silvanus.alvin@umn.ac.id

Luhut sebagai tokoh sentral yang harus bertanggung jawab atas isu penundaan Pemilu 2024 dan berkewajiban untuk menunjukkan validitas klaim Big Data. Sementara, Kompas.com membingkai isu penundaan Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Luhut secara pribadi

Kata Kunci: Luhut, Penundaan Pemilu 2024, Big Data, Analisis Framing

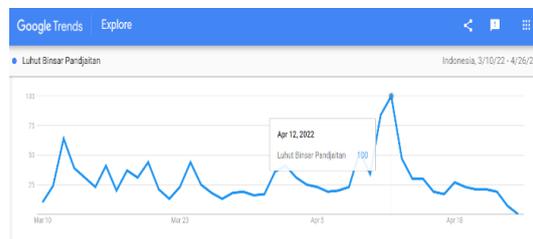
PENDAHULUAN

Indonesia akan melaksanakan Pemilu pada 2024 mendatang. Namun, mencuat isu penundaan pelaksanaan Pemilu. Isu tersebut pertama kali disampaikan ke publik oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Close the Door Podcast di akun YouTube Dedy Corbuzier (Alvin, 2022b). Dalam acara tersebut, Luhut mengklaim ada suara rakyat yang terekam dalam Big Data dengan jumlahnya mencapai 110 juta pada 11 Maret 2022.

Video yang sudah ditonton lebih dari tiga juta warganet diberitakan kembali oleh media, sehingga perhatian publik semakin besar dan isu penundaan Pemilu tersebut semakin ramai dibicarakan. Viralitas maupun popularitas dari isu penundaan Pemilu dapat diketahui dari Google Trends.

Google Trends merupakan aplikasi tak berbayar untuk menangkap viralitas sebuah isu atau topik dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan permintaan pengguna. Melalui aplikasi ini, Google memberikan penilaian dalam rentang 0-100 terhadap sebuah isu atau topik. Isu dengan nilai 0 berarti tidak adanya ketertarikan atau data yang ada di internet tidak cukup untuk dianalisa. Sementara, nilai 100 hanya diberikan pada isu dengan tingkat ketertarikan tinggi dan menunjukkan puncak pencarian isu tersebut di internet.

Data dari Google Trends (2022) dalam rentang 10 Maret 2022 hingga 26 April 2022, terdapat dua titik ekstrim yang meruncing ke atas (ditunjukkan dengan Gambar 1), pada tanggal 12 Maret 2022 dengan nilai 64 dan pada tanggal 12 April 2022 dengan nilai 100.



Gambar 1. Data Google Trends dengan Pencarian Luhut Binsar Pandjaitan, sumber: Google Trends (2022)

Luhut menyampaikan klaim 110 juta suara warganet mendukung penundaan Pemilu pada 11 Maret 2022. Namun, informasi tersebut baru viral keesokan harinya setelah diberitakan pula oleh media pers arus utama sehingga menghasilkan grafik yang meruncing pada 12 Maret. Sementara, pada grafik meruncing kedua dengan nilai 100 terjadi pada 12 April 2022 yang disebabkan oleh kejadian sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia berdebat dengan Luhut terkait klaim Big Data 110 juta mendukung Pemilu ditunda. Peristiwa yang terjadi membanjiri pemberitaan di media-media Indonesia.

Sebuah kejadian layak dijadikan berita ketika berhasil memenuhi unsur *news value* atau nilai berita. Pengertian atas nilai berita adalah sebuah konsep untuk menentukan sebuah informasi atau kejadian yang dianggap layak dan dapat dikonversi menjadi sebuah berita (Pomper dan Hoffman, 2020). Fondasi dari konsep nilai berita pertama kali dicetuskan oleh Galtung dan Ruge (1965) dalam sebuah konferensi akademis internasional di Oslo. Mereka menyimpulkan ada 12 faktor nilai berita. Bilamana sebuah informasi atau kejadian sudah memenuhi salah satunya, maka pantas dijadikan berita.

Adapun 12 faktor nilai berita menurut Galtung dan Ruge (1965) ialah *frequency* atau seberapa sering sebuah peristiwa terjadi, *threshold* atau kejadian/informasi yang layak jadi berita harus berdampak besar bagi publik, *unambiguity* atau kejadian/informasi yang

jernih sehingga layak diberitakan, *meaningfulness* atau kejadian/informasi yang memiliki kedekatan secara kultur dan juga jarak, *consonance* atau kejadian/informasi yang berisi prediksi, *unexpectedness* atau kejadian/informasi yang unik, *continuity* atau kejadian/informasi yang berkelanjutan, *composition* atau kejadian/informasi untuk memberikan keseimbangan dalam pemberitaan sebuah media, *reference to elite nations* atau kejadian/informasi yang berasal dari petinggi negara, *reference to elite people* atau kejadian/informasi yang berasal dari kalangan elit di suatu masyarakat, *reference to persons* atau kejadian/informasi yang terjadi di masyarakat, dan *reference to negativity* atau kejadian/informasi yang berdampak negatif sehingga pantas dijadikan berita.

Hampir menuju enam dekade, konsep nilai berita mengalami perkembangan dari sisi akademis. Berawal dari 12 faktor, kini nilai berita telah dipadatkan menjadi tujuh faktor dari nilai berita (Pomper dan Hoffman, 2020), yakni *audience* atau kejadian/informasi yang melibatkan audiens dalam jumlah besar, *impact* atau kejadian/informasi yang dapat memberi dampak besar bagi masyarakat, *proximity* atau kejadian/informasi yang dekat secara fisik maupun non-fisik, *timeliness* atau kejadian/informasi yang tidak lekang oleh waktu, *prominence* atau kejadian/informasi yang bersumber dari tokoh terkenal dan populer, *unusualness* atau kejadian/informasi yang di luar batas normal, *conflict* atau kejadian/informasi yang berisi konflik.

Isu mengenai penundaan Pemilu 2024 memenuhi faktor-faktor nilai berita, di antaranya adalah dari faktor *prominence*, isu ini disampaikan oleh pejabat tinggi negara yakni Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri; dari faktor *impact*, isu penundaan pemilu akan berdampak tidak hanya bagi partai politik maupun politisi, melainkan juga masyarakat dalam menggunakan hak suaranya; dan dari faktor *conflict*, isu penundaan Pemilu menimbulkan pro dan kontra sehingga mengakibatkan terjadinya konflik.

Lebih lanjut, peristiwa yang berkaitan erat dengan politik menjadi magnet tersendiri bagi media pers arus utama untuk meliputnya (Alvin, 2022a).

Hampir seluruh media pers arus utama di Indonesia memberitakan isu penundaan Pemilu 2024. Meski demikian, isi berita yang disajikan antar media tidaklah sama. Penyajian berita yang berbeda dapat dijelaskan melalui perspektif teori dan konsep.

Dari perspektif teori, dikenal adanya teori hirarki pengaruh media yang dicetuskan Shoemaker dan Reese pada 1996. Asumsi teori tersebut adalah bahwa isi sebuah berita dipengaruhi oleh berbagai level, mulai dari level individu (wartawan sebuah media), level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia, hingga level ideologi antar media yang berbeda sehingga menghasilkan berita yang berbeda pula.

Tidak hanya itu, dari perspektif konsep, ada konsep *framing*. Entman (2003) menjelaskan *framing* sebagai upaya memilih dan menyoroti beberapa aspek peristiwa atau isu, kemudian dipromosikan sehingga interpretasi, evaluasi, dan/atau solusi yang diinginkan dapat tercapai. Dalam *framing* di media, sorotan dapat dilakukan melalui pemilihan kata-kata dan gambar yang konstruktif untuk merangsang tercapainya bingkai yang diinginkan (Entman, 2003). Dengan demikian, sebuah peristiwa dapat disajikan dalam *framing* atau pembedaan berita yang beragam sudut pandang.

Framing tertentu yang disajikan media akan membentuk realitas. Publik mengkonstruksi realitas berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, di mana berita yang disajikan media merupakan salah satu sumber informasi tersebut (Wijaya, 2015; Alvin, 2022).

Sehubungan dengan isu penundaan Pemilu 2024, ada tendensi pula media-media di Indonesia menyajikan dalam bingkai tertentu. Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti *framing* atau pembedaan media pers arus utama terhadap isu penundaan Pemilu 2024 atas dasar klaim *big data* 110 juta suara

warganet yang disuarakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Media yang jadi objek penelitian adalah portal berita daring. Penentuan tersebut didasari oleh laporan dari Reuters Institute yang mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia (89 persen) mendapatkan berita dari portal berita daring yang diakses dari ponsel pintarnya (Steele, 2021).

Lebih lanjut, ada banyak sekali portal berita daring di Indonesia. Dalam konteks penelitian, penulis menentukan dua media yakni cnnindonesia.com dan kompas.com. Pemilihan kedua portal tersebut didasari Laporan Reuters Institute yang menyatakan bahwa dari beragam *brand* (merek) media, masyarakat Indonesia paling mempercayai CNN Indonesia dengan 69 persen. Sementara itu, Kompas berada di posisi kedua sebagai media paling dipercaya di Indonesia dengan 67 persen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pembinggkaihan dari dua portal berita paling dipercaya di Indonesia atas isu penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh Luhut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif. Denzin dan Lincoln (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengkaji dari sisi kuantitas atau jumlah, melainkan menitikberatkan pada realita yang terbangun secara sosial dimana ada upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Leavy (2017) menambahkan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, atau menjelaskan fenomena sosial tertentu.

Paradigma dari penelitian ini ialah konstruktivis. Leavy (2017) menjelaskan realitas terbangun dari konstruksi dan rekonstruksi yang terjadi dari interaksi sehari-hari. Lebih lanjut, model analisis penelitian *framing* yang akan digunakan adalah model Robert Entman. Dalam model Entman (2003), terdapat empat elemen untuk membedah dan menganalisa *framing*

sebuah berita yaitu *define problems* (bagaimana sebuah masalah dalam satu isu disampaikan oleh media), *diagnose cause* (bagaimana media menyampaikan siapa pihak yang bertanggungjawab atau siapa yang menjadi penyebab masalah), *make moral judgment* (bagaimana suatu nilai moral dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi sebuah tindakan), dan *treatment recommendation* (bagaimana rekomendasi solusi yang ditawarkan oleh media).

Unit analisis dari penelitian ini adalah serangkaian artikel berita dari CNN Indonesia (cnnindonesia.com) dan Kompas (kompas.com) yang dipublikasikan dalam pada 12 April 2022. Pemilihan tanggal tersebut didasari oleh dua alasan. Pertama, pada tanggal tersebut, sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia berdebat dengan Luhut Binsar Pandjaitan terkait klaim *big data* 110 juta warganet menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Alasan kedua, Google Trends (2022) menunjukkan puncak popularitas dari isu penundaan Pemilu pada tanggal tersebut.

Pada tanggal tersebut, CNN Indonesia menerbitkan lima artikel dan Kompas mengunggah enam artikel. Adapun rincian artikel sebagai berikut.

Tabel 1. Artikel CNN Indonesia

No	Judul Berita
1.	Luhut Temui Rektor UI, Mahasiswa Demo Kibarkan Bendera Kuning
2.	Luhut Hampiri Demo BEM UI, Debat Soal Big Data Penundaan Pemilu
3.	PDIP Sentil Menteri Usul Tunda Pemilu Dalih Big Data: Sampean Siapa?
4.	Luhut Tolak Buka Big Data saat Debat dengan Mahasiswa di Kampus UI
5.	Luhut Tanya BEM UI: Siapa yang Bilang Saya Minta Presiden 3 Periode?

Tabel 2. Artikel Kompas

No	Judul Berita
1.	Luhut Temui Rektor UI Secara Tertutup, Puluhan Mahasiswa Gelar

	Aksi Protes
2.	Hampiri Mahasiswa yang Demo di UI, Luhut: Mau Kalian Apa?
3.	Luhut ke Mahasiswa soal Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode: Saya Tak Pernah Katakan Wacana Itu
4.	Didesak Mahasiswa UI Buka “Big Data” Penundaan Pemilu, Luhut: Kamu Enggak Berhak Nuntut Saya
5.	Temui Luhut, Mahasiswa UI Perdebatkan soal “Big Data” Dukungan Penundaan Pemilu 2024
6.	Diadang Mahasiswa, Luhut: Kita Semua Harus Semakin Terbiasa dengan Perbedaan Pendapat

Setelah membedah artikel-artikel yang sudah ditentukan dari kedua media, peneliti selanjutnya juga mewawancarai redaktur politik dari tiap media. Dari CNNIndonesia.com, narasumber kunci adalah Gilang Fauzi. Sementara dari Kompas.com, narasumber kunci adalah Sabrina Asril selaku Kepala Desk Nasional Kompas.com. Hasil wawancara ini guna mengetahui proses penentuan *framing* dari masing-masing media, sekaligus untuk validasi dan menambah kedalaman analisa penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Framing CNNIndonesia.com

Dalam sub-bab ini, akan dibedah *framing* dari masing-masing berita CNN Indonesia yang menjadi unit analisis. Adapun terdapat lima artikel yang akan dibedah sebagai berikut.

Berita 1: *Luhut Temui Rektor UI, Mahasiswa Demo Kibarkan Bendera Kuning*

No	Elemen Framing dan Penjelasan
1.	<i>Define Problems:</i> CNN Indonesia melaporkan aksi demonstrasi oleh mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan untuk memprotes Luhut Binsar Pandjaitan.

	Dari berita ini, penekanan utama yang ditampilkan adalah aksi demonstrasi mahasiswa terhadap Luhut.
2.	<i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab dari aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa UI adalah kehadiran Luhut ke UI dan menemeui Rektor UI Ari Kuncoro.
3.	<i>Moral Judgement:</i> CNN Indonesia menuliskan adanya aksi teatrikal dengan mengibarkan bendera kuning sebagai tanda matinya demokrasi dan adanya hambatan melakukan unjuk rasa. Kutipan langsung dari sisi mahasiswa lebih mendapat porsi daripada kutipan Humas UI. Dari penyajian narasi berita ini, CNN Indonesia melegitimasi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.
4.	<i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia memberikan rekomendasi secara implisit aksi demonstrasi yang dilakukan

Berita 2: *Luhut Hampiri Demo BEM UI, Debat Soal Big Data Penundaan Pemilu*

No	Elemen Framing dan Penjelasan
1.	<i>Define Problems:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia memberikan penekanan aksi Luhut yang bertemu dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.
2.	<i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab utama yang ditampilkan adalah mahasiswa menuntut Luhut membuka data lampiran dari klaim <i>big data</i> 110 juta suara warganet yang mendukung penundaan pemilu.

3.	<p><i>Moral Judgement:</i> CNN Indonesia mendelegitimasi aksi yang dilakukan Luhut. Hal ini tampak dari dua hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kutipan langsung: <i>"Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda pemilu)," ucap mantan elite Kopassus tersebut.</i> - Narasi penutup berita: <i>Luhut berdebat dengan mahasiswa terkait penundaan pemilu. Setelah perdebatan tak menghasilkan kesepakatan, Luhut pun memutuskan untuk meninggalkan massa aksi. Dia langsung keluar kampus UI bersama rombongannya.</i> <p>Dari penyajian kutipan langsung dan narasi berita di atas, CNN Indonesia melaporkan Luhut menemui mahasiswa tapi tidak mau menjawab tuntutan dan meninggalkan lokasi.</p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia memberikan rekomendasi secara implisit agar Luhut menjawab tuntutan mahasiswa untuk membuka data lampiran dari klaim <i>big data</i>.</p>

Berita 3: PDIP Sentil Menteri Usul Tunda Pemilu Dalih Big Data: Sampean Siapa?

Pembedahan <i>Framing</i> Berita 3	
No	Elemen <i>Framing</i> dan Penjelasan
1.	<p><i>Define Problems:</i> CNN Indonesia memberikan penekanan agar Pemilu dilaksanakan pada 2024 mendatang.</p> <p>Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan narasumber dari anggota DPRD Fraksi PDIP Junimart Girsang yang menolak wacana penundaan Pemilu.</p>
2.	<p><i>Diagnose Cause:</i></p>

	<p>Dari berita ini, penyebab dialamatkan pada wacana penundaan Pemilu yang didorong oleh beberapa menteri.</p>
3.	<p><i>Moral Judgement:</i> CNN Indonesia melegitimasi penolakan penundaan Pemilu.</p> <p>Hal ini tampak dari narasi dan kutipan langsung yang ditempatkan di tubuh berita sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasi: <i>Junimart yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu kemudian menyentil sosok menteri yang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menggunakan argumen data.</i> - Kutipan: <i>"Kedua, masalah tunda, perpanjangan, mundur atau apapun menyangkut pemilu, itu menjadi kewenangan legislatif, bukan kewenangan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kan begitu," kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/4).</i> <p><i>"Jadi, kalau seseorang mengatakan, bila eksekutif pemilu akan diperpanjang, sesuai dengan data misalnya, loh memang sampean siapa?" sambungnya.</i></p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia memberikan rekomendasi secara implisit aksi demonstrasi yang dilakukan</p>

Berita 4: Luhut Tolak Buka Big Data saat Debat dengan Mahasiswa di Kampus UI

Pembedahan Framing Berita 4	
No	Elemen Framing dan Penjelasan
1.	<p><i>Define Problems:</i> CNN Indonesia memberikan penekanan pada penolakan Luhut untuk membuka <i>big data</i> penundaan Pemilu.</p> <p>Hal ini tampak jelas dari judul dan <i>lead</i> berita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul: <i>Luhut Tolak Buka Big Data saat Debat dengan Mahasiswa di Kampus UI</i> - Lead: <i>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka buka big data soal penundaan pemilu saat berdebat dengan massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4).</i>
2.	<p><i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, desakan mahasiswa untuk membuka <i>big data</i> dikarenakan tuntutan yang serupa sudah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tapi tidak direspon oleh Luhut.</p>
3.	<p><i>Moral Judgement:</i> CNN Indonesia melegitimasi desakan untuk membuka <i>big data</i> yang menjadi dasar klaim penundaan Pemilu.</p> <p>Hal ini tampak dari pencantuman narasi dan kutipan langsung yang mengingatkan pembaca bahwa sebelum mahasiswa, ICW juga sudah menuntut hal yang sama sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasi: <i>Ini bukanlah momen pertama Luhut diminta membuka big data. Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Koordinator</i>

	<p><i>Bidang Maritim dan Investasi untuk mengirimkan surat permintaan informasi publik mengenai klaim big data yang menyebut 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.</i></p> <p>- Kutipan: <i>"Kami mendesak Luhut agar segera membuka informasi publik berupa big data pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum tahun 2024," ujar peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (30/3) lalu..</i></p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia memberikan rekomendasi agar Luhut menunjukkan lampiran data dari klaim <i>big data</i> 110 juta warganet ingin Pemilu ditunda.</p>

Berita 5: Luhut Tanya BEM UI: Siapa yang Bilang Saya Minta Presiden 3 Periode?

Pembedahan Framing Berita 5	
No	Elemen Framing dan Penjelasan
1.	<p><i>Define Problems:</i> CNN Indonesia memberikan penekanan pada pernyataan Luhut yang mengatakan bukan dirinya meminta Pemilu ditunda, melainkan aspirasi dari akar rumput.</p> <p>Hal ini tampak jelas dari beberapa kutipan langsung di tubuh berita sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kutipan: <i>"Saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya presiden 3 periode? Saya tanya siapa?" tanya Luhut kepada massa aksi. "Saya enggak pernah bilang itu," kata Luhut.</i>

	"Dengerin ya, jangan marah-marah, saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu di tunda. Itu aja. Apa salah?" ucap Luhut.
2.	<i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia berusaha menyampaikan kepada publik bahwa Luhut menolak disebut sebagai orang yang mewacanakan penundaan Pemilu.
3.	<i>Moral Judgement:</i> CNN Indonesia mendelegitimasi ucapan Luhut bahwa bukan dirinya yang mengenalkan kepada publik isu penundaan Pemilu.
4.	<i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, CNN Indonesia memberikan rekomendasi implisit agar Luhut menunjukkan lampiran data dari klaim <i>big data</i> 110 juta warganet ingin Pemilu ditunda.

Berdasarkan pembedahan *framing* dari lima artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa CNNIndonesia.com membingkai Luhut sebagai individu sentral yang bertanggung jawab atas isu penundaan Pemilu 2024. Lebih lanjut, CNNIndonesia.com juga membingkai Luhut sebagai individu yang tidak tepat dalam mendorong wacana penundaan Pemilu. Hal tersebut tampak pada artikel nomor 3 di mana narasumber yang dikutip adalah anggota DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang. Selain itu, CNNIndonesia.com juga mendorong agar Luhut menunjukkan validitas dari klaim *big data* 110 juta warganet mendukung penundaan Pemilu.

Hasil Framing Kompas.com

Dalam sub-bab ini, akan dibedah *framing* dari masing-masing berita Kompas.com yang menjadi unit analisis. Adapun terdapat enam artikel yang akan dibedah sebagai berikut.

Berita 1: Luhut Temui Rektor UI Secara Tertutup, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Protes

Pembedahan Framing Berita 1	
No	Elemen Framing dan Penjelasan
1.	<i>Define Problems</i> Kompas memberikan penekanan pada pertemuan Luhut dan Rektor UI Ari Kuncoro yang dilakukan tertutup. Hal ini tampak dari judul dan kutipan langsung dalam tubuh berita. - Judul: <i>Luhut Temui Rektor UI Secara Tertutup, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Protes</i> - Kutipan: <i>"Pertama terkait statuta UI yang saat ini masih bermasalah dan prosesnya tidak pernah melibatkan semua unsur yang ada di UI termasuk mahasiswa," ujar Bayu.</i> <i>"Kedua adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan oleh bapak Luhut, maka dari itu kami menyatakan 'mosi tidak percaya' pada rektor UI dan bapak Luhut," sambungnya..</i>
2.	<i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab masalah dialamatkan pada Luhut terkait isu penundaan Pemilu.
3.	<i>Moral Judgement:</i> CNN Indonesia melegitimasi desakan mahasiswa untuk menolak penundaan Pemilu. Hal ini tampak dari pencantuman kutipan langsung mahasiswa yang berunjuk rasa sebagai berikut. - Kutipan: <i>"Mau kalian apa, biar saya</i>

	<p>jawab?," tanya Luhut kepada peserta aksinya.</p> <p>"Kita mau menyuarakan (protes), yang pertama terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Harus terus ditegaskan oleh pemerintah untuk menolak wacana itu," jawab mahasiswa.</p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, Kompas memberikan rekomendasi agar pemerintah memberi penegasan untuk menolak wacana penundaan Pemilu.</p>

Berita 2: Hampiri Mahasiswa yang Demo di UI, Luhut: Mau Kalian Apa?

Pembedahan <i>Framing</i> Berita 2	
No	Elemen <i>Framing</i> dan Penjelasan
1.	<p><i>Define Problems</i> Kompas memberikan penekanan pada tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah yang disampaikan kepada Luhut.</p> <p>Hal ini tampak dari narasi dan kutipan langsung dalam tubuh berita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasi: <i>Mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo itu lalu menjawab bahwa mereka melakukan aksi untuk memprotes wacana penundaan pemilu, yang salah satunya pernah disuarakan oleh Luhut.</i> - Kutipan: <i>"Kita mau menyuarakan (protes), yang pertama terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Harus terus ditegaskan oleh pemerintah untuk menolak wacana itu,"</i>

kata Bayu	
2.	<p><i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab masalah dialamatkan pada Luhut terkait isu penundaan Pemilu.</p> <p>Hal ini tampak dari kutipan langsung berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kutipan: <i>"Kita tahu baca di media Pak Luhut Binsar Pandjaitan menyuruh ketua partai untuk bicara penundaan pemilu," sambungnya.</i>
3.	<p><i>Moral Judgement:</i> Kompas melegitimasi desakan mahasiswa agar pemerintah menolak wacana penundaan Pemilu.</p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, Kompas memberikan rekomendasi agar pemerintah dengan tegas untuk menolak wacana penundaan Pemilu.</p>

Berita 3: Luhut ke Mahasiswa soal Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode: Saya Tak Pernah Katakan Wacana Itu

Pembedahan <i>Framing</i> Berita 3	
No	Elemen <i>Framing</i> dan Penjelasan
1.	<p><i>Define Problems</i> Kompas memberikan penekanan pada pembelaan Luhut atas tuduhan menjadi dalang atas isu penundaan Pemilu.</p> <p>Hal ini tampak dari narasi dan kutipan langsung dalam tubuh berita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasi: <i>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan</i>

	<p>presiden tiga periode. Hal itu dikatakan Luhut kepada para mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tengah berdemo, meminta penjelasan soal wacana tersebut.</p> <p>- Kutipan: <i>"Dengerin, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Pernah saya katakan, di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," kata Luhut saat menemui para peserta aksi, Selasa (12/4/2022).</i></p>
2.	<p><i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab masalah dialamatkan pada Luhut terkait isu penundaan Pemilu.</p> <p>Hal ini tampak dari kutipan langsung berikut.</p> <p>- Kutipan: <i>"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di big data, silakan buka big data-nya. Apakah Bapak berani," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Bayu Satria Utomo.</i></p>
3.	<p><i>Moral Judgement:</i> Kompas melegitimasi desakan mahasiswa agar pemerintah menolak wacana penundaan Pemilu.</p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, Kompas memberikan rekomendasi agar pemerintah dengan tegas untuk menolak wacana penundaan Pemilu.</p>

Berita 4: Didesak Mahasiswa UI Buka "Big Data" Penundaan Pemilu, Luhut: Kamu Enggak Berhak Nuntut Saya

Pembedahan Framing Berita 4	
No	Elemen Framing dan Penjelasan
1.	<p><i>Define Problems</i> Kompas memberikan penekanan pada penolakan Luhut yang tidak mau membuka data atas klaim <i>big data</i> 110 juta warganet mau menunda Pemilu.</p>
2.	<p><i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab masalah dialamatkan pada Luhut terkait isu penundaan Pemilu yang tidak mau membuka datanya dari klaim <i>big data</i>.</p>
3.	<p><i>Moral Judgement:</i> Kompas mendelegitimasi penolakan dan bantahan Luhut terhadap tuntutan mahasiswa membuka <i>big data</i>.</p> <p>Hal ini tampak dari narasi dan kutipan di tubuh berita sebagai berikut.</p> <p>- Narasi: <i>Para mahasiswa terus mendesak Luhut untuk membuka big data tersebut. Mahasiswa menyebut Luhut bersikap otoriter.</i></p> <p>- Kutipan: <i>"Kami minta dibuka!" teriak salah satu mahasiswa. "Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga menuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu," kata Luhut.</i></p> <p><i>"Otoriter nih," teriak mahasiswa.</i></p> <p><i>"Kalau otoriter, saya enggak samperin kamu," jawab Luhut.</i></p>
4.	<p><i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, Kompas memberikan rekomendasi agar Luhut sebagai</p>

pejabat publik mempertanggungjawabkan <i>big data</i> yang jadi dasar klaim penundaan Pemilu.
--

Berita 5: Temui Luhut, Mahasiswa UI
 Perdebatkan soal "Big Data" Dukungan
 Penundaan Pemilu 2024

Pembedahan <i>Framing</i> Berita 5	
No	Elemen <i>Framing</i> dan Penjelasan
1.	<i>Define Problems</i> Kompas memberikan penekanan pada perdebatan antara Luhut dan sekumpulan mahasiswa yang menolak wacana penundaan Pemilu.
2.	<i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penyebab masalah dialamatkan pada Luhut terkait isu penundaan Pemilu yang tidak mau membuka datanya dari klaim <i>big data</i> .
3.	<i>Moral Judgement:</i> Kompas melegitimasi ketidakpuasan mahasiswa atas jawaban yang diterima dari Luhut karena menolak membuka <i>big data</i> . Hal ini tampak dari rangkaian narasi dan kutipan di tubuh berita sebagai berikut. <i>Menurut Luhut, ia hanya menyampaikan aspirasi yang diterima dari akar rumput. "Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," ujar dia.</i> <i>Mendengar hal, itu para mahasiswa belum puas dari jawaban atas klarifikasinya Luhut. Mereka pun meminta bukti soal <i>big data</i> yang disebut Luhut sebelumnya.</i>

"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di <i>big data</i> , apa Bapak yang minta," tanya mahasiswa.	
4.	<i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, Kompas memberikan rekomendasi agar Luhut sebagai pejabat publik mempertanggungjawabkan <i>big data</i> yang jadi dasar klaim penundaan Pemilu.

Berita 6: Diadang Mahasiswa, Luhut: Kita Semua Harus Semakin Terbiasa dengan Perbedaan Pendapat

Pembedahan <i>Framing</i> Berita 6	
No	Elemen <i>Framing</i> dan Penjelasan
1.	<i>Define Problems</i> Kompas memberikan penekanan pada perbedaan pendapat termasuk hal lumrah dalam demokrasi. Hal ini tampak dari pengutipan takarir atau <i>caption</i> dari media sosial Luhut sebagai sumber tunggal di keseluruhan berita.
2.	<i>Diagnose Cause:</i> Dari berita ini, penghadangan yang dialami Luhut didasari oleh perbedaan pendapat
3.	<i>Moral Judgement:</i> Kompas melegitimasi perbedaan pendapat dalam demokrasi.
4.	<i>Treatment Recommendation:</i> Dari berita ini, Kompas memberikan rekomendasi agar perbedaan pendapat dalam politik tidak direspon secara negatif. Hal ini tampak dari pengutipan takarir Luhut di tubuh berita sebagai berikut. - Kutipan: <i>"Saya hanya ingin berpesan, bahwa kita semua harus semakin terbiasa dengan</i>

perbedaan pendapat, dan kita harus mau untuk saling mendengarkan, tanpa perlu ribut-ribut apalagi sampai melakukan kekerasan," ujarnya.

"Sebagai orang tua, besar harapan saya bahwa kelak mereka yang memimpin bangsa ini bisa menyadari bahwa apa pun perbedaan pendapat yang hadir di tengah-tengah masyarakat, harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana," lanjut Luhut.

Berdasarkan pembedahan *framing* dari lima artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com membingkai isu penundaan Pemilu 2024 ini tidak hanya tertuju pada satu pejabat saja, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah secara menyeluruh dan pemerintah didorong untuk menyatakan penolakan atas penundaan Pemilu 2024. Ada pula dorongan dari Kompas.com terhadap Luhut untuk membuka *big data* tapi tidak signifikan. Tidak hanya itu, artikel keenam Kompas.com memberi bingkai kepada publik bahwa negara yang menganut demokrasi patut menghargai pro dan kontra dari sebuah isu.

Pembahasan

Media pers tidaklah netral, melainkan memiliki sikap dan pandangan dalam melihat sebuah peristiwa yang kemudian dimuat menjadi berita. Ketidaknetralan tersebut dapat terlihat dari pembedaan yang dibuat oleh masing-masing media. Sebuah peristiwa dapat diberitakan dengan penekanan aspek yang berbeda-beda (Entman, 2003).

CNNIndonesia.com dan Kompas.com sama-sama memberitakan peristiwa debat antara Luhut dan mahasiswa. Secara garis besar, kedua media memiliki kesamaan pembedaan berita yakni menolak penundaan Pemilu 2024. Meski demikian, masing-masing media

memiliki penonjolan aspek maupun seleksi isu yang berbeda.

Pembedaan masing-masing berita menggunakan model Robert N. Entman menunjukkan CNNIndonesia.com lebih menonjolkan Luhut sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dan mendesak agar *big data* diungkap ke publik. Sementara, Kompas.com lebih menekankan pada pemerintah, bukan Luhut.

Kumpulan berita-berita politik, termasuk isu penundaan Pemilu 2024, disajikan CNNIndonesia.com di kanal nasional. Struktur anggota redaksi dalam kanal tersebut terdiri dari tiga editor (atau setingkat redaktur), delapan *writer* (atau setingkat dengan asisten redaktur), dan 15 wartawan lapangan. Informasi mengenai sikap media dan pembedaan CNNIndonesia.com diberikan oleh Gilang Fauzi selaku editor.

Sikap CNNIndonesia.com atas isu penundaan Pemilu 2024 ditetapkan melalui dua tahap, yakni secara eksternal dan internal. Secara eksternal, redaksi CNNIndonesia.com mengundang dua pakar yang mampu memberikan penjelasan bernas terkait isu penundaan Pemilu 2024. Kedua pakar tersebut adalah Feri Amsari, akademisi dari Universitas Andalas dan Zainal Arifin Mochtar, akademisi dari Universitas Gadjah Mada.

Saat kami diskusi pada pakar politik dan hukum, kami diskusi baik buruknya penundaan pemilu. Kebetulan hasil pemaparan masing-masing pakar itu lebih banyak mudaratnya. Selain mudarat, ada konsekuensi yang berpoentsi besar terjadi bila pemilu ditunda atau masa jabatan presiden ditambah, akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat (Gilang Fauzi, 2022, dalam wawancara).

Selanjutnya, secara internal, CNNIndonesia.com melakukan tiga level rapat. Rapat pertama dilakukan di internal kanal nasional, dilanjutkan pada tahap yang lebih tinggi di rapat lintas kanal, dan diakhiri pada rapat paripurna antara

CNNIndonesia.com dan CNN Indonesia TV.

Hasil isu-isu yang telah difilter kantor dibawa ke rapat besar yang melibatkan CNN TV. CNNIndonesia.com dan CNN TV beda redaksi, nantinya sinergi isu TV dan dotcom berdasarkan tahapan proses yang dilalui tadi (Gilang Fauzi, 2022, dalam wawancara).

Dari rapat eksternal dan internal tersebut, CNNIndonesia.com menentukan sikap untuk mengkritisi wacana penundaan Pemilu 2024 yang bergulir di publik. Keputusan mengkritisi wacana penundaan Pemilu 2024 juga didasari pada argumen dua pakar yang diundang CNNIndonesia.com yakni bahwa memang ada langkah konstitusi yang memungkinkan Pemilu ditunda atau masa jabatan Presiden diperpanjang. Informasi ini sedikit berbeda dengan temuan analisis *framing* yang dilakukan di mana CNNIndonesia.com condong pada penolakan penundaan Pemilu 2024.

Bagi redaksi CNNIndonesia.com, isu politik yang menuai kontroversi dan berdampak besar bagi masyarakat luas perlu direspon dengan hati-hati. Oleh karena itu, pengambilan sikap untuk mengkritisi isu tersebut dianggap sebagai langkah terbaik.

Bentuk nyata dari mengkritisi diwujudkan dengan upaya melakukan klarifikasi. Upaya ini senada dengan temuan analisis *framing* yang dilakukan di mana CNNIndonesia.com meminta agar ada penjelasan detail dari Luhut atas mencuatnya penundaan Pemilu 2024, termasuk di dalamnya klaim *big data*.

Sebelum wacana itu bergulir lebih jauh, kita bersikap mengkritisi lebih dahulu. Sebelum menolak, kita berupaya mencari tahu apa urgensi pemerintah memperpanjang atau menunda pemilu 2024... Bagaimana kita mau menolak isu tersebut jika orang yang dianggap

menggulir isu tersebut menepis sendiri isu yang dipertanyakan. Kita kiritisi lebih dulu sebelum bersikap apakah harus menolak atau tidak, istilahnya kita harus tabayyun (Gilang Fauzi, 2022, dalam wawancara).

Luhut ditetapkan sebagai sosok yang bertanggungjawab karena CNNIndonesia.com dalam upaya mencari klarifikasi telah mengantongi informasi-informasi *off the record* konkrit dari narasumber yang dapat dipercaya.

Salah satu tim kita mendapatkan info tersebut (informasi di balik layar) dan info itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari info itu kami dapat bahwa isu penundaan pemilu ini digulirkan atas inisiasi pemerintah, dan disebutkan nama Luhut. Maka kemudian yang terjadi kita berusaha keras mencari konfirmasi ke yang bersangkutan... (hal ini memang) menjurus ke Menko (Luhut), itu didukung oleh serangan politik dari PDIP. Ada politikus yang cukup keras dan lantang bilang sumbernya itu Menko, dibunyikan oleh Masinton. Jadi ada validasi yang memperkuat info sebelumnya (Gilang Fauzi, 2022, dalam wawancara).

Lebih lanjut, upaya klarifikasi memang ditujukan pada Luhut Binsar Pandjaitan sebagai sosok yang dianggap menginisiasi isu penundaan Pemilu 2024. Debat antara Luhut dan mahasiswa di komplek Universitas Indonesia, Depok, dianggap CNNIndonesia.com sebagai momen penting dalam pencarian klarifikasi. Peristiwa tersebut terjadi secara insidental atau tanpa disengaja.

Kebetulan peristiwa itu sifatnya incidental dan dadakan, ada momen peristiwa langka, itu kita jadikan peristiwa breaking news... Saat Menko ada di UI berkunjung

dan dapat penolakan mahasiswa, saat itu momentum puncak usaha kita mengkonfirmasi ulang dari pihak ybs. Sampai dititik itu cukup meredakan urgensi penundaan pemilu karena sentiment publik untuk melawan narasi wacana tunda pemilu itu cukup kuat (Gilang Fauzi, 2022, dalam wawancara).

Pembingkaihan berita-berita yang berfokus pada klarifikasi Luhut dianggap CNNIndonesia.com cukup efektif dalam melemahkan wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab argumentasi yang disampaikan Luhut dianggap lemah dan tidak detail.

Kita berusaha konfirmasi ulang apa alasan mendasari Pemilu perlu ditunda atau diperpanjang, kita tidak dapat jawaban tegas, malah isu tersebut ditepis sendiri oleh yang bersangkutan. Ketika konfrontasi terjadi (antara Luhut dan mahasiswa), itu memperlemah wacana yang sedang digulirkan pihak yang bersangkutan (Gilang Fauzi, 2022, dalam wawancara).

Sementara itu, Kompas.com dalam peristiwa debat antara Luhut dan mahasiswa, memiliki sikap untuk menonjolkan isu penundaan Pemilu 2024 sebagai ide yang tidak boleh berkembang di level elit politik dan di level publik.

Sebagai informasi, kanal nasional di Kompas.com dipimpin oleh seorang kepala desk yang dijabat oleh Sabrina Asril. Lebih lanjut, terdapat lima editor, 11 wartawan, dan dua *content writer*.

Berbeda dari CNNIndonesia.com, penentuan sikap di Kompas.com didasari pada rapat internal di kanal nasional saja. Rapat tersebut dilakukan secara semi-formal, hanya diikuti oleh kepala desk serta lima editor, tanpa melibatkan pimpinan redaksi. Para wartawan dan dua *content writer* patuh pada hasil keputusan yang diambil dalam rapat internal tersebut.

Lebih ke tim kecil di desk nasional saja sih. Isu bergulir cepat, tidak semua diputuskan di rapat redaksi, tidak sampai level sana. Kita di grup editor, aku pemimpin desk, ada asisten editor ada 5, kita diskusi mau arahkan ke mana, kalau penundaan pemilu kita semua sepakat menolak. Jadi level sebatas desk, lalu kita turunin ke pemberitaan, masih dalam koridor Kompas Gramedia. Kalau sudah nyeleneh, paling bos-bos, minimal redpel, bilang jangan gini, atau stop isu ini (Sabrina Asril, 2022, dalam wawancara)

Dalam memberitakan peristiwa politik, Kompas.com memiliki dua pendekatan. Pertama, menunjukkan sikap media melalui pemberitaan. Kedua, tidak menunjukkan sikap media atau hanya sebatas memotret fakta. Sehubungan dengan objek pada penelitian ini, Kompas.com lebih condong pada pendekatan pertama yakni berita-berita yang berisi sikap media.

Jadi kita di isu penundaan Pemilu ini concern banget, jadi gimana caranya supaya isu ini tidak makin besar dan tidak banyak pendukungnya. Gimana caranya kita patahkan isu ini. Kita ada prinsip, Undang-Undang jelas tidak memungkinkan itu, kalau sampe diubah gara-gara satu tokoh, jadi ada kesan mudah dipermainkan aturannya. Ada efek lebih besar lagi bisa jadi kerusuhan dan sebagainya, demi melanggengkan kekuasaan 1 orang saja... Ada beberapa isu kita punya prinsip, jangan sampai goal kayak tunda Pemilu atau revisi UU KPK. Kita ada media standing, tapi ada juga kayak gaduh-gaduh Partai Demokrat, ya kita hanya memotret fakta. Kita lihat tiap isu apakah harus ada stand point jelas, tapi kalau elit yang main dan nggak berefek ke rakyat kita hanya

jabarkan fakta saja. (Sabrina Asril, 2022, dalam wawancara).

Kepala Desk Nasional Kompas.com Sabrina Asril memberikan konfirmasi pada temuan penelitian ini bahwa isu penundaan Pemilu 2024 ini dibingkai sedemikian rupa untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari Kompas.com mengambil sikap tersebut, antara lain adalah isu penundaan Pemilu 2024 lebih menguntungkan pihak elit politik, mengancam stabilitas politik yang sudah terjaga, dan melawan pihak-pihak yang punya hasrat untuk terus berkuasa.

Begitu pula ketika memberitakan peristiwa debat antara Luhut dan mahasiswa pada 12 April 2022, seleksi dan penonjolan aspek dititikberatkan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Secara eksplisit, pemerintah yang dimaksud oleh Kompas.com ini menyasar pada Presiden Joko Widodo. Kompas.com memiliki kepercayaan bahwa menteri adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Oleh karena itu, Presiden turut dianggap bertanggung jawab atas isu penundaan Pemilu 2024.

Pertanyaannya jadi siapa yang bisa negur Luhut, ya presiden kan, menteri di bawah presiden. Jadi peluru ke pemerintah atau presiden. Dia menteri mencerminkan pemerintah. Sementara pemerintah nggak cuma Luhut saja, ada menteri dari PDIP menolak (Pemilu 2024 ditunda). Jadi aneh, pemerintah suaranya yang mana?... Jadi presiden dong harus tanggung jawab pada koalisi dan menteri-menterinya. Jadi kita memang mendesak statement lebih tegas dari presiden (Sabrina Asril, 2022, dalam wawancara).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini kembali membuktikan bahwa tidak ada media yang bersikap netral. Tiap media memiliki

pandangannya masing-masing dalam melihat sebuah peristiwa dan menonjolkan aspek-aspek tertentu. Pandangan tersebut ditunjukkan pada berita-berita yang disajikan pada publik. Kumpulan berita yang menjadi objek penelitian di CNNIndonesia.com dan Kompas.com menunjukkan ada pembingkai yang berbeda.

CNNIndonesia.com sebagai media yang paling dipercaya publik membingkai Luhut sebagai individu yang wajib bertanggungjawab atas isu penundaan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, ada pula dorongan dari CNNIndonesia.com agar Luhut membuka *big data* yang dijadikan acuan dalam penundaan Pemilu. Dari sisi redaksi, pembingkai yang dilakukan lebih condong pada pemberian ruang bagi Luhut untuk mengklarifikasi wacana penundaan Pemilu beserta klaim *big data*.

Sementara itu, Kompas.com menunjukkan pemerintah perlu bertanggungjawab atas isu penundaan Pemilu 2024. Dalam memberitakan debat Luhut dan mahasiswa, Luhut tidak dipandang sebagai individu, melainkan perwakilan pemerintah. Aspek utama yang berusaha dicapai oleh Kompas.com adalah ketegasan pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk menolak penundaan Pemilu 2024. Dari sisi redaksi, Kompas.com dengan tegas menolak adanya penundaan Pemilu sehingga pembingkai berita yang dilakukan menjadi negasi atau antitesis dari isu yang digulirkan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas Multimedia Nusantara yang mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, S. (2022) Komunikasi Politik di Era Digital: dari Big Data, Influencer Relations & Kekuatan Selebriti, hingga Politik Tawa. Yogyakarta: DeePublish.
- Alvin, S. (2022) Luhut Pandjaitan dan Klaim soal Big Data. Kompas.com. Diakses dari:

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06450071/luhut-pandjaitan-dan-klaim-soal-big-data> (diakses pada 26 April 2022).
- Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. (2009) *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Entman, R. (2003) Cascading Activation: Contesting the White House's Frame After 9/11, *Political Communication*, 20(4), hlm. 415-432.
- Galtung, J., & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news, *Journal of Peace Research*, 2(1), hlm. 64-91.
- Google (2022) Google Trends for Luhut Binsar Pandjaitan. Diakses dari: <https://trends.google.com/trends/explorate?date=2022-03-10%202022-04-26&geo=ID&q=%2Fg%2F122hcvpt> (diakses pada 26 April 2022).
- Leavy, P. (2017) *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Art-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. London: The Guilford Press.
- Pomper, D., dan Hoffman, L. (2020) From What is News to How Vital is News, *Mass Communication and Society*, 23 (5), hlm. 603-607.
- Steele, J. (2021) 2021 Digital News Report. Reuters Institute. Dapat diakses di: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/indonesia> (diakses pada 26 April 2022).
- Wijaya, L. (2015). Discourse Coverage Of Editorial Perspective: Framing Terrorism From The Case Of Al-Shabab's 2013 Kenya Mall Siege. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 123-138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v7i1.427>